

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perbankan syariah menempati posisi penting dalam ekosistem ekonomi dan keuangan nasional Indonesia, dengan peran utama mendorong inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan sektor ini mendapatkan dukungan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga pelaku usaha dan masyarakat luas. Pengelolaan Bank Umum Syariah dilakukan oleh dewan direksi, sementara pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan seluruh operasional sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perbankan yang berlaku.¹

Awal perkembangannya dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga perbankan syariah pertama di negeri ini. Bank ini bahkan berhasil melewati krisis moneter tahun 1997-1998, yang membuktikan ketangguhan model bisnis syariah. Pertumbuhan sektor ini semakin pesat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²

¹ Afriyadi Afriyadi And Siti Aisyah, *Sejarah Dan Ruang Lingkup Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, March 19, 2024, .

² Andrew Shandy Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Unes Law Review* 2, No. 3 (2020): 290–98, <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V2i3.121>.

Kinerja perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan positif. Pada Januari 2026, Total aset perbankan syariah mencapai Rp 1.034,46 triliun, atau turun sebesar 3,11% dibanding Desember 2025 namun masih tumbuh 9,09% year-on-year. Pencapaian ini juga didukung oleh penyaluran pembiayaan yang tercatat mencapai Rp 709,11 triliun atau tumbuh 10,96% yoy, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp 811,74 triliun atau tumbuh 10,08% yoy. Secara keseluruhan, kinerja perbankan syariah tetap menunjukkan ketahanan yang baik dengan market share sebesar 7,46%.³

Saat ini, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia, yaitu Bank Aceh Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Nasional (hasil *spin-off* BTN Syariah melalui akuisisi Bank Victoria Syariah), Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Bank Aladin Syariah, dan Nanobank Syariah.⁴ Dari ke-14 bank tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank dengan modal dan aset tertinggi pada tahun 2026.

³ *Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Di Tengah Meningkatnya Ketidakpastian Global, April 6, 2026, <https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Rdcb-Maret-2026.Aspx>.*

⁴ *Bank Umum Syariah, N.D., <https://Ojk.Go.Id/Id/Regulasi/Pages/Bank-Umum-Syariah.Aspx>.*

Tabel 1. 1 Total Aset Bank Umum Syariah Tahun 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	Bank Umum Syariah	Total Aset
1	Bank Aceh Syariah	Rp 29.999.116
2	BPD Riau Kepri Syariah	Rp 31.008.614
3	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	Rp 17.348.890
4	Bank Muamalat Indonesia	Rp 62.290.523
5	Bank Syariah Nasional (hasil <i>spin-off</i>)	Rp 72.797.372
6	Bank Jabar Banten Syariah	Rp 16.316.177
7	Bank Syariah Indonesia	Rp 439.629.224
8	Bank Mega Syariah	Rp 14.470.337
9	Bank Panin Dubai Syariah	Rp 19.520.057
10	Bank Syariah Bukopin	Rp 8.463.927
11	BCA Syariah	Rp 20.111.107
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Rp 22.898.922
13	Bank Aladin Syariah	Rp 15.659.136
14	Nanobank Syariah	Rp 8.600.533

Tabel di atas menyajikan data mengenai total aset yang dimiliki oleh 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, dengan satuan nilai dalam jutaan rupiah. Data tersebut mencakup periode pelaporan yang bervariasi, mulai dari Desember 2025 hingga Maret 2026, dengan mayoritas data diperbarui per Februari 2026. Bank Syariah Indonesia (BSI) menempati posisi teratas dengan total aset terbesar, yaitu sebesar Rp439.629.224 juta.⁵ Hal ini menunjukkan dominasi BSI dalam industri perbankan syariah nasional dari sisi skala aset. Di posisi kedua dan ketiga berturut-turut adalah Bank Syariah Nasional dengan Rp72.797.372 juta⁶ dan Bank Muamalat Indonesia dengan Rp62.290.523 juta⁷. Sebaliknya, bank dengan total aset terkecil dalam

⁵ Laporan Posisi Keuangan Bsi, February 28, 2026, <https://www.bankbsi.co.id/Company-Information/Reports/Xjcg6qdit7a58sqpq91wdoin9numpprv5zwwqsah>.

⁶ Laporan Bank Bulanan BSN, February 28, 2026, <https://bankbsn.co.id/laporan-bank/bulanan>.

⁷ Laporan Triwulan Bank Muamalat, n.d., <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/laporan-triwulan>.

daftar ini adalah Nanobank Syariah dan Bank Syariah Bukopin, masing-masing mencatat nilai Rp8.600.533⁸ juta dan Rp8.463.927 juta⁹. Secara umum, data ini menggambarkan struktur industri perbankan syariah di Indonesia yang didominasi oleh beberapa bank besar, sementara bank-bank lainnya memiliki skala usaha yang lebih kecil. Perbedaan besaran aset ini juga dapat mencerminkan perbedaan dalam pangsa pasar, jangkauan layanan, serta kemampuan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan masing-masing bank.

Sebagai pemain utama di sektor perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia menunjukkan dominasi dengan total aset yang jauh melampaui bank umum syariah lainnya. Kondisi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan dampak dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat industri perbankan syariah. Pada 1 Februari 2021, pemerintah meresmikan Bank Syariah Indonesia sebagai hasil merger antara Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah, dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas permodalan dan daya saing perbankan syariah di tingkat global. Bank Syariah Indonesia bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara langsung, melainkan anak perusahaan dari tiga BUMN bank, dengan komposisi saham yang dipegang oleh Bank Mandiri (51,47%), Bank

⁸ *Laporan Posisi Keuangan Publikasi Bulanan Nanobank Syariah*, n.d., <https://www.nanobanksyariah.id/assets/Publikasi-Bulanan-Februari-2026.pdf>.

⁹ *Laporan Posisi Keuangan Publikasi Bulanan KB Bank Syariah*, n.d., <https://www.kbbanksyariah.co.id/flipbook/2026/laporan-bulanan-maret-2026/294>.

BNI (23,24%), dan Bank BRI (15,38%).¹⁰ Integrasi ketiga bank syariah besar tersebut secara signifikan memperbesar skala operasional dan jaringan layanan Bank Syariah Indonesia, menjadikannya pemain utama dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan bank syariah lain di Indonesia.

Berdasarkan laporan posisi keuangan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) per 28 Februari 2026, total aset tercatat sebesar Rp439,63 triliun dengan komposisi utama berupa piutang Rp170,51 triliun, pembiayaan bagi hasil Rp148,23 triliun, serta surat berharga Rp62,81 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi Desember 2025 yang mencapai Rp456,19 triliun, terdapat penurunan sekitar Rp16,56 triliun dalam dua bulan pertama tahun 2026. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan dan penyesuaian nilai aset keuangan.

Dari sisi profitabilitas, laporan laba rugi menunjukkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,36 triliun hingga Februari 2026. Hal ini menghasilkan *Return on Equity* (ROE) sekitar 2,56%, sedangkan *Return on Asset* (ROA) tercatat sekitar 0,31%. Rasio Net Imbalan (NIM) menunjukkan hasil positif melalui pendapatan penyaluran dana sebesar Rp4,86 triliun dengan pendapatan bersih setelah distribusi bagi hasil Rp3,51 triliun. Selain itu, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR) berada pada level 21,40%, jauh di atas standar regulasi yang berlaku, sehingga mencerminkan daya tahan permodalan yang kuat. Likuiditas juga terjaga

¹⁰ “Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Periode 2024,” <https://www.bankbsi.co.id/company-information/flipbook/reports/2024/316>.

dengan baik, tercermin dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berada pada kisaran 84–85%. Rasio kas (*Cash Ratio*) tercatat sekitar 1,76%, sedangkan efisiensi operasional bank dapat dilihat dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang berada pada kisaran 69–70%, serta *Cost to Income Ratio* (CIR) sekitar 49%, menunjukkan pengelolaan biaya yang relatif efektif.

Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio *Non Performing Financing* (NPF) tetap terjaga pada level yang rendah, sehingga mencerminkan kemampuan BSI dalam menjaga kualitas aset produktif dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Secara keseluruhan, indikator keuangan utama BSI per Februari 2026 menggambarkan kondisi yang kuat dan sehat. Bank mampu mempertahankan stabilitas keuangan, profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional, serta kualitas pembiayaan meskipun menghadapi dinamika penurunan aset pada awal tahun 2026¹¹.

Kinerja keuangan dan operasional pada umumnya menjadi fokus utama dalam menilai perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.¹² Namun, berbeda dengan perbankan konvensional, kinerja Bank Umum Syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan manajemen semata, tetapi juga oleh bagaimana masing-masing bank mengkomunikasikan

¹¹ Muhammad Ilham Putra Rahmadana, “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Yang Dimoderasi Oleh Inflasi: Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2020–2024” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2026).

¹² Pirmansyah Riko, “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Dengan Pendekatan Rgec (Studi Komparatif Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Di Indonesia Periode 2022–2024)” (Uin Raden Intan Lampung, 2026).

dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam identitas korporatnya. Konsep yang mengatur hal ini dikenal sebagai *Islamic Corporate Identity* atau juga disebut Identitas Etika Syariah, yang didefinisikan sebagai kesesuaian antara prinsip-prinsip syariah yang ideal dengan komunikasi atau pelaporan praktik etis yang dilakukan oleh bank melalui laporan tahunan dan berbagai kanal komunikasi lainnya.¹³

Konsep *Islamic Corporate Identity* pertama kali dikembangkan oleh Haniffa dan Huda Ib pada tahun 2007. Dalam penelitian mereka, telah diidentifikasi delapan dimensi yang menjadi dasar bagi penerapan konsep ini pada lembaga keuangan syariah, yaitu: (1) Visi dan Misi; (2) Dewan Komisari dan Manajemen Puncak; (3) Produk dan Layanan; (4) Zakat, Sedekah, dan Pinjaman Kebajikan; (5) Komitmen kepada Masyarakat; (6) Hubungan dengan Pemangku Kepentingan; (7) Tata Kelola Perusahaan; dan (8) Transparansi dan Akuntabilitas.¹⁴

Pada praktiknya, salah satu contoh penerapan konsep ini dapat dilihat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Bank Umum Syariah terbesar di Indonesia. Setiap dimensi *Islamic Corporate Identity* tersebut diintegrasikan dalam berbagai aspek operasional dan pengelolaan bank, mulai dari penyusunan visi misi hingga pelaporan kinerja yang tidak hanya mengacu pada standar keuangan umum tetapi juga standar syariah yang berlaku.

¹³ Eka Laily Romadhani and Rofiul Wahyudi, "Pengaruh *Islamic Corporate Identity* (ICI) Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2015): 125, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.125-140>.

¹⁴ Roszaini Haniffa and Mohammad Hudaib, "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports," *Journal of Business Ethics* 76, no. 1 (2007): 97–116, <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>.

Untuk mengukur sejauh mana penerapan delapan dimensi tersebut, digunakan alat ukur yang dikenal sebagai *Ethical Identity Index* (EII). Dimana setiap dimensi terdiri dari sejumlah item yang dianggap penting untuk diungkapkan berdasarkan kerangka kerja bisnis etis syariah. Sebagai contoh, dimensi Visi dan Misi mencakup item seperti komitmen beroperasi sesuai prinsip syariah, penyediaan return yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta fokus pada kepentingan pemegang saham dan pelanggan. Metode pengukuran dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk setiap item yang diungkapkan dan skor 0 jika tidak diungkapkan. Total skor yang diperoleh kemudian dijumlahkan dan dibandingkan dengan jumlah item ideal yang seharusnya diungkapkan untuk masing-masing dimensi.¹⁵

Penerapan *Islamic Corporate Identity* yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, memperkuat reputasi bank, dan pada akhirnya berdampak positif pada kinerja keuangan. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara identitas etika yang diungkapkan dan yang ideal pada sebagian besar bank syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penerapan *Islamic Corporate Identity* pada Bank Syariah Indonesia sebagai bank terbesar di industri perbankan syariah Indonesia, serta bagaimana pengukuran melalui delapan dimensi Haniffa dan Huda Ib dapat memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara identitas korporat syariah dan kinerja bank. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

¹⁵ Haniffa And Hudaib, "Exploring The Ethical Identity Of Islamic Banks Via Communication In Annual Reports," 2007.

pengembangan ilmu perbankan syariah, menjadi referensi bagi praktik manajemen di industri keuangan syariah Indonesia, dan sekaligus mengisi kesenjangan penelitian terkait implementasi identitas korporat syariah pada lembaga keuangan skala besar di negara ini.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana Kinerja Bank Syariah Indonesia berdasarkan *Islamic Corporate Identity* periode tahun 2024?
- b. Bagaimana Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia periode tahun 2024 meliputi Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, dan Efisiensi?
- c. Bagaimana Analisis Kinerja Syariah berdasarkan *Islamic Corporate Identity* dikaitkan dengan Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Indonesia periode tahun 2024?

1.3 TUJUAN PEMBAHASAN

- a. Untuk mengetahui Kinerja Bank Syariah Indonesia berdasarkan *Islamic Corporate Identity* periode tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia periode tahun 2024 meliputi Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, dan Efisiensi.
- c. Untuk menganalisis Kinerja Syariah berdasarkan *Islamic Corporate Identity* dikaitkan dengan Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Indonesia periode tahun 2024.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada kajian ilmu perbankan syariah, khususnya terkait penerapan *Islamic Corporate Identity* pada lembaga perbankan skala besar di Indonesia.
- b. Menambah referensi dan memperkaya literatur tentang pengukuran *Islamic Corporate Identity* menggunakan delapan dimensi Haniffa dan Huda Ib, serta pengukuran kinerja bank melalui indikator profitabilitas (*Return On Assets*), solvabilitas (*Capital Adequacy Ratio*), likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*), dan efisiensi (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional).
- c. Menunjukkan relevansi konsep *Islamic Corporate Identity* dengan praktik operasional bank syariah di Indonesia, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan kerangka teoritis lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi berbagai pihak terkait dengan industri perbankan syariah.

- a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyempurnakan penerapan *Islamic Corporate Identity* serta memperbaiki kinerja bank sesuai dengan standar yang berlaku.
- b. Bagi Industri Perbankan Syariah, menjadi referensi bagi Bank Umum Syariah lainnya dalam mengembangkan dan mengimplementasikan identitas korporat syariah yang sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan kinerja perbankan.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, menyediakan dasar informasi dan arahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik *Islamic Corporate Identity* dan kinerja bank syariah.

1.5 BATASAN PENELITIAN

Untuk menjaga fokus dan kelayakan penelitian, beberapa batasan telah ditetapkan sesuai dengan cakupan dan tujuan penelitian.

- a. Objek penelitian hanya dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai sampel penelitian, dengan pertimbangan BSI merupakan Bank Umum Syariah dengan total aset terbanyak di Indonesia. Selain itu, BSI menguasai lebih dari separuh pangsa pasar perbankan syariah nasional sehingga hasil analisisnya representatif terhadap industri. Status BSI sebagai BUMN dan anggota Himbara juga menjadikannya memiliki tata kelola serta transparansi data yang lebih konsisten dibanding BUS lain, sekaligus karakteristik unik sebagai hasil merger tiga bank syariah besar.

Dengan demikian, pemilihan BSI sebagai satu-satunya objek penelitian memberikan fokus yang mendalam sekaligus relevansi strategis terhadap tujuan penelitian.

- b. Periode penelitian terbatas pada tahun 2024 saja, dengan data yang bersumber dari Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada ketersediaan data yang paling baru dan lengkap pada saat penelitian dilaksanakan, sehingga tidak dapat menggambarkan perkembangan penerapan *Islamic Corporate Identity* dan kinerja bank dalam jangka waktu panjang.
- c. Pengukuran *Islamic Corporate Identity* hanya menggunakan delapan dimensi yang dikembangkan oleh Haniffa dan Huda Ib, sehingga tidak mencakup aspek identitas korporat syariah menurut kerangka kerja atau konsep lainnya.
- d. Pengukuran Kinerja Bank hanya menggunakan empat indikator utama yaitu profitabilitas (*Return On Assets*, *Return On Equity*, dan *Net Interest/Imbalan Margin*), solvabilitas (*Capital Adequacy Ratio*, *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum* dan *Leverage Ratio*), likuiditas (*Financing to Deposit Ratio* dan *Cash Ratio*), dan efisiensi (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan *Cost to Income Ratio*). Indikator ini dipilih berdasarkan standar pengukuran kinerja perbankan syariah yang berlaku, namun tidak mencakup indikator lain seperti pertumbuhan bisnis atau kualitas pembiayaan.

e. Metode Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi aktual dari variabel penelitian. Metode ini tidak melibatkan uji statistik inferensial atau analisis hubungan antar variabel, sehingga tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat prediktif atau menggeneralisasikan hubungan variabel pada populasi yang lebih luas.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta definisi operasional variabel penelitian. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang fokus dan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teoritis yang mendukung penelitian, termasuk konsep *Islamic Corporate Identity* (dengan delapan dimensi Haniffa dan Huda Ib), konsep kinerja bank syariah (dengan indikator profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan efisiensi), serta kajian penelitian terdahulu yang relevan. Bagian ini bertujuan untuk memperkuat dasar teoritis dan

memberikan konteks yang jelas terkait variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian (kuantitatif deskriptif), lokasi dan objek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan diterapkan. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penelitian secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan dan diulang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang telah dikumpulkan, termasuk deskripsi penerapan *Islamic Corporate Identity* pada BSI tahun 2024 dan deskripsi kinerja bank berdasarkan indikator yang ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan untuk menginterpretasikan hasil analisis secara mendalam dan menghubungkannya dengan landasan teoritis dari Bab II.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian. Saran dapat ditujukan kepada BSI, industri perbankan syariah, regulator, maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian terkait.